

Kepala desa dan ulama sebagai *the rural elites* di Kalitorong, seharusnya bersinergi untuk membangun desa, tetapi realitasnya mereka justru sering terlibat kontestasi. Mereka sering berbeda pendapat, berebut kuasa, mencari kesalahan, dan saling menjatuhkan dan sebagainya. Kontestasi ini antar elit ini telah lama terjadi dan masih berlangsung sampai sekarang. Pertanyaannya adalah mengapa para ulama dan kepala desa di Kalitorong itu berkontestasi? Untuk menjawab pertanyaan tersebut, penulis mengajukan sub-pertanyaan sebagai berikut : Sejauhmana keterbatasan sumber daya alam, dan rendahnya kualitas sumber daya manusia menjadi potensi kontestasi antar elit di desa Kalitorong? Sejauhmana elit agama dan elit pemerintah desa itu menguasai arena sosial (*field*), memiliki habitus dan kapital? Bagaimana para elit itu menggunakan arena sosial, habitus dan kapital untuk berkontestasi di era Orde Baru dan era pasca reformasi? Apa kepentingan di balik kontestasi antar elit di desa Kalitorong?

Untuk mengkaji fenomena kontestasi antar elit di desa Kalitorong, peneliti meminjam teori konsep sosiologi yang ditawarkan Bourdieu yaitu arena (*field*), habitus, dan kapital. Ketiga komponen itu membentuk rumus yang dikenal dengan formulasi tindakan generatif yaitu (Habitus x Kapital) + Ranah = Praksis. Dari rumus tersebut tampak bahwa tindakan sosial itu merupakan hasil dialektis dari arena, habitus dan kapital yang sering digunakan dalam *game*. Peneliti menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan etnografi. Untuk mengumpulkan data, peneliti menggunakan teknik wawancara mendalam, observasi dan studi dokumen. Data kemudian dideskripsikan, didialogkan dengan teori, dan interpretasikan. Proses tersebut berjalan secara siklus interaktif.

Kajian ini menemukan bahwa kontestasi antara kepala desa dengan ulama ini terjadi karena perebutan arena sosial - kepala desa ingin memperluas arena sosialnya (*field*) yang selama ini menjadi arena sosial elit agama. Sehingga *symbolic power* dari elit agama, minimal, menjadi berkurang, atau melemah. Elit agama sebagai aktor kontestasi kemudian menggunakan habitus agar menjadi pemenang dalam perebutan tersebut. Hal itu tidak dilakukan sendiri, tetapi mengerahkan kapital yang dimiliki, baik kapital ekonomi, kultural maupun sosial. Maka, elit agama mampu memenangkan kontestasi atas kepala desa. Elit agama tetap memiliki *symbolic power*, sehingga ditaati, dihormati, diakui sebagai kyai di masyarakat.

Kajian ini menemukan bahwa *the real actor* dari tindakan kontestasi ini para elit, bukan antar kelas. Pihak yang mampu berkontestasi dengan kepala desa itu harus orang yang memiliki banyak kapital, dan itu hanya dimiliki oleh para elit. Maka, tindakan sosial di Kalitorog itu merupakan *contestation within the rural elites* (kontestasi antar elit). Para elit dengan cerdas menggunakan *habitus* sebagai *modus operandi* dan *opus operatum*. Elit berebut dan ingin menguasai arena sosial (*field*) yang tersedia, agar memperoleh kapital.

Di samping itu, kajian ini juga menemukan bahwa pada masyarakat yang memiliki basis keagamaan yang kuat seperti Kalitorong, kapital agama ini tersedia sangat melimpah, dan sering dijadikan alat kontestasi. Pihak yang berkontestasi sering menggunakan ayat al-Qur'an atau fatwa untuk dijadikan legitimasi tindakan sosial. Hal ini dilakukan pada waktu pilkades, pemilu, kerja bakti dan tindakan sosial lainnya. Kapital yang berbasis pada agama ini sulit dikategorikan dalam *forms of capital* sebagaimana yang ditawarkan oleh Bourdieu. Meskipun demikian, kapital ini akan fungsional kalau bekerja dengan kapital lainnya.

Kontestasi merupakan bagian dari dinamika kehidupan sosial yang akan selalu muncul di pedesaan, dengan tingkat eskalasi yang berbeda. Kontestasi bukanlah tindakan



**KONTESTASI ANTAR ELIT DESA DALAM MEMPEREBUTKAN KAPITAL (STUDI DI DESA DI  
KALITORONG, KAB. PEMALANG,  
JAWA TENGAH)**

AGUS NURHADI, DRS.,MA., Prof. Dr. Susetiawan / Dr. Pudjo Semedi Hargo Yuwono

UNIVERSITAS  
GADJAH MADA

Universitas Gadjah Mada, 2016 | Diunduh dari <http://etd.repository.ugm.ac.id/>  
yang dilarang, asal dilakukan secara *fair* (adil). *Fairness* ini harus berbasis pada etika, moral,  
dan agama, bukan kepentingan sehingga diharapkan kehidupan sosial itu bermartabat.

*Key words: kontestasi, elit, kapital, field, habitus.*

In Kalitorong , ulama and umara, the rural elites, ideally should work together to build the village instead of continuous conflict since the New Order era to the present . They are the rural elite that should be good role models in the community. However, both involve in the conflict . The question is why do both the elites involve in conflict ? To answer these questions, researchers asked a sub - research questions as follows : To what extend are limited natural resources, and the low quality of human resources potential to be instrumentalised by the elite in the village Kalitorong ? To what extend do umara and ulama in Kalitorong build power, how they maintain the power ? How is the process of conflict ulama and umara , and how they utilize the instruments in the conflict ? Who get benefits from the conflict in Kalitorong ?

Researcher use conflict perspective to understad the phenomenon, by borrowing theories in sociology such as Pareto, Bourdieu, and Weber. The approach used in this study is qualitative because it requires deepening. To collect the data , the authors use the technique of in-depth interviews, observation and document study. The data is then described, discussed with the theory, and interpreted. The process is run in an interactive cycle.

From research found some conclusions. *First*, social life was filled by contestation, and conflict. Atmosphere *toto tentrem* in social life often heard in ceremony just mythos. Limited access to natural resources and human resources are potential to create a conflict. The conflict is not a conflict of classes, ideology, or institutions, but the conflict between the elite (conflict among the elite ) by exploiting ' the alit ' . Therefore, the trouble maker in the village is the elite. If the elites is peace, the village is also harmony.

*The second*, the root of conflict among elites is power struggle in various social field. The social arena previously occupied by ulama then controlled by the head of village, such as the prohibition of teaching, the establishment of madras, the head of the village entrance on the territory of *fidyah*, charity, and other activities. This means that the village head limitation of the role of ulama. Thus, scholars then decide to overthrow the head of the village. The field is an important because it provide the *jeneng* and *jenang*. Ulama and umara are harmony if there are power sharing of the social field.

*The third*, the strategy used in the conflict in t the ' authoritarian regime ' is hidden (soft strategy) , an indirect, hidden. In addition, ulama also *nabok nyilih tangan* in the conflict. This is very different from the reform era, even they use violence. All strategy are used to win the conflict. There is no ethic or values. The most beneficial in the conflict among elites in Kalitorong is the ulama. They are in power again, while the mass of grass roots just get nothing.